

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah kata kunci dalam setiap usaha peningkatan kualitas kehidupan manusia yang berperan dan bertujuan memanusiakan manusia. Pendidikan pada hakikatnya adalah sebuah proses pematangan kualitas hidup, melalui proses tersebut manusia diharapkan dapat memahami apa arti dan hakikat hidup, serta untuk apa dan bagaimana menjalankan tugas hidup dan kehidupan secara benar.¹

Tak berlebihan kiranya jika maju mundurnya suatu bangsa sangat ditentukan oleh mutu pendidikannya. Keberhasilan suatu bangsa dalam membangun pendidikan juga menjadi barometer tingkat kemajuan bangsa bersangkutan. Masalah pendidikan menjadi kian penting dan strategis karena bisa dijadikan fundamen sosial guna mendorong proses transformasi masyarakat. Pendidikan berkaitan langsung dengan isu-isu krusial seperti kemiskinan, kesejahteraan, kesehatan, kohesi sosial, dan demokrasi.

Atas dasar itu, penguatan kemampuan daya saing di berbagai bidang dengan pengembangan sumber daya manusia (SDM) merupakan prioritas utama dalam pendidikan. Singkatnya, dalam upaya peningkatan SDM, peranan pendidikan sangat signifikan. Oleh karena itu sangat penting bagi pembangunan nasional untuk memfokuskan peningkatan mutu pendidikan. Pendidikan yang

¹Agustinus Hermino, *Asesmen Kebutuhan Organisasi Persekolahan Tinjauan Perilaku Organisasi Menuju Comprehensive Multilevel Planning*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 1.

bermutu akan diperoleh pada sekolah yang bermutu, dan sekolah yang bermutu akan menghasilkan SDM yang bermutu pula.

Dalam konteks ini, keberhasilan program pendidikan melalui proses belajar mengajar sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satu di antaranya adalah keuangan. Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan faktor yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kajian manajemen pendidikan. Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan merupakan potensi yang sangat menentukan dan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan, komponen keuangan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan-kegiatan proses belajar mengajar di sekolah bersama komponen-komponen lain.²

Penyelenggaraan pendidikan, keuangan merupakan potensi yang sangat menentukan dan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Komponen keuangan pada sebuah lembaga pendidikan merupakan komponen yang membantu kualitas pendidikan baik dari *input*, *proses* dan *output*. Pendidikan bernilai sangat strategis didukung oleh keuangan yang mampu mencapai kata memadai dalam pendidikan. Kegiatan pendidikan diperlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan yang berhubungan dengan kelangsungan proses pendidikan.

²Echo Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah Konsep, Strategi, Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 47.

Keuangan menjadi masalah sentral dalam pengelolaan pendidikan. Ketidakmampuan suatu lembaga untuk menyediakan keuangan, akan menghambat proses belajar mengajar. Hambatan pada proses belajar mengajar dengan sendirinya menghilangkan kepercayaan masyarakat pada suatu lembaga. Namun, bukan berarti bahwa apabila tersedia keuangan yang berlebihan akan menjamin bahwa pengelolaan sekolah akan lebih baik. Dalam konteks perencanaan pendidikan, pemahaman tentang hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dan pembiayaan pendidikan sangatlah diperlukan. Pembiayaan pendidikan yang lebih tepat dan adil serta mengarah pada pencapaian tujuan pendidikan baik secara kuantitatif maupun kualitatif.³

Pengelolaan keuangan secara umum dapat dilakukan dengan baik oleh semua sekolah, hanya pengaruh substansial implementasi yang beraneka ragam pada masing-masing sekolah. Keragaman ini bergantung pada letak geografis sekolah, keadaan sekolah, partisipasi *stakeholder* pada masing-masing sekolah. Baik sekolah negeri dan swasta memiliki pengelolaan yang baik sehingga dalam kegiatan didalamnya diperlukan manajemen yang baik sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Menurut Bastian yang mengungkapkan bahwa sekolah tidak terlepas dari manajemen pembiayaan karena dibutuhkan untuk operasional sekolah mulai dari penggajian tenaga pendidik dan kependidikan, menambah atau memperbaiki fasilitas guna meningkatkan kualitas dan kuantitas sekolah, membiayai kebutuhan sekolah. Untuk membantu dalam masalah pembayaran operasional sekolah,

³ Dedi Supriyadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 3

pemerintah memberikan bantuan dana yang disebut Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan kepada SD/MI/SDLB serta SMP/MTs/SMPLB. Pemerintah memberikan dana ini langsung ke sekolah/madrasah guna membantu kegiatan proses pembelajaran dan pembiayaan pendidikan peserta didik untuk pendaftaran siswa baru, buku pelajaran pokok dan penunjang untuk perpustakaan, pemeliharaan sekolah, ujian, ulangan dan honor guru.⁴

Pendidikan swasta dalam konteks pembiayaan pendidikan mendapatkan bagian paling kecil dari pemerintah karena pembiayaan atau pendanaan bagi satuan pendidikan yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat menjadi tanggungjawab masyarakat, satuan pendidikan yang bersangkutan.⁵ Sekolah swasta meskipun sudah mendapatkan dana BOS namun untuk menunjang operasional lain, sekolah harus mampu *survive* melalui Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), sumbangan donatur yang tidak mengikat sekolah, dan bantuan serta sumber keuangan lain yang mampu membiayai kebutuhan sekolah.

Hal penting dalam manajemen keuangan adalah sumber pembiayaan dana/keuangan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 46 menyebutkan bahwa tanggungjawab pendanaan/pembiayaan pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Berangkat dari ini maka tanggungjawab berada semua aspek yang berhubungan dengan sekolah sebagai lembaga pendidikan. Dijelaskan lebih lanjut pada pasal 51 mengenai sumber dana pendidikan bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Melalui pengelolaan dana pemerintah berdasarkan pada anggaran pendidikan,

⁴ Indra Bastian, *Akuntansi Pendidikan*, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 168.

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010) h. 229-230.

sedangkan pada anggaran dana pemerintah daerah menjadikan hal ini hak otonomi pada masing-masing daerah. Dana satuan pendidikan melalui masyarakat berupa pungutan dari orang tua/wali murid yang dilaksanakan sesuai perundang-undangan, bantuan dari pemangku kepentingan pendidikan serta sumbangan yang tidak mengikat.

Diberlakukannya kebijakan otonomi daerah yang menyerahkan masalah pendidikan ke daerah dan sekolah masing-masing, maka masalah keuanganpun menjadi kewenangan yang diberikan secara langsung dalam pengelolaannya kepada sekolah. Dalam hal ini, kepala sekolah dibantu semua staf dalam sebuah sekolah memiliki tanggung jawab penuh terhadap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah.⁶

Desentralisasi pendidikan meliputi suatu proses pemberian kewenangan yang lebih luas pada bidang kebijakan pendidikan dan aspek pendanaannya dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal dan pada saat yang bersamaan kewenangan yang lebih besar juga diberikan pada tingkat sekolah/madrasah. sekolah memastikan dirinya menggali, memanfaatkan serta mengerahkan seluruh potensi sumber daya yang dimilikinya agar mampu meningkatkan kualitas pendidikan. Otonomi diberikan agar sekolah secara leluasa mengelola sumberdaya, sumber dana, sumber belajar dan mengalokasikannya sesuai prioritas kebutuhan serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Termasuk dalam hal manajemen keuangan sekolah, sekolah memiliki kewenangan yang luas dalam menggali dan mengelola sumber dana sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah secara

⁶Echo Mulyasa, *Menjadi....*, h. 194

bijaksana, transparan dan akuntabel. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Pasal 48 ayat (1) mengenai prinsip pengelolaan dana satuan pendidikan harus berprinsip pada keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.⁷ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah an-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58)

Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah merupakan bagian dari kegiatan pembiayaan pendidikan, yang secara keseluruhan menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan (mengelola keuangan), mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan secara efektif dan transparan. Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, manajemen keuangan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Disatu sisi lembaga pendidikan perlu dikelola dengan tata pamong yang baik, sehingga menjadikan lembaga pendidikan yang bersih dari berbagai malpraktik pendidikan yang merugikan pendidikan.⁸

Dalam konteks ini, manajemen keuangan madrasah yang baik dan benar perlu dilakukan untuk menunjang penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka mengefektifkan kegiatan belajar-mengajar dan meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Hal ini penting, terutama dalam kerangka manajemen berbasis

⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* (SISDIKNAS), Pasal 48, ayat (1).

⁸Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.256.

sekolah, yang memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan keperluan masing-masing sekolah karena pada umumnya dunia pendidikan selalu di hadapkan pada permasalahan keterbatasan dana dan program yang harus dilakukan cukup banyak, sementara sumber daya yang dimiliki sangatlah terbatas. Oleh karena itu manajemen keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam mengelola sumber daya yang ada agar proses pembelajaran dapat berjalan.

Manajemen keuangan di madrasah terutama berkenaan dengan kiat madrasah dalam menggali dana, madrasah dalam mengelola dana, pengelolaan keuangan dikaitkan dengan program tahunan madrasah, cara mengadministrasikan dana madrasah, dan cara melakukan pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan yang berkaitan dengan pelaporan dana kegiatan di madrasah. Dalam pengelolaan keuangan yang baik, dibutuhkan sumber daya yang berkompeten pada bidangnya. Pengelolaan madrasah mencakup berbagai segi baik staf tata laksana administrasi, staf teknis pendidikan yaitu kepala madrasah dan guru, komite sekolah sebagai badan independen yang membantu terlaksananya operasional dana pendidikan dan siswa sebagai peserta didik yang ditempatkan sebagai konsumen dengan tingkat pelayanan yang memadai.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan pendidikan di madrasah maka akan membicarakan tentang bagaimana madrasah menggali sumber dana pendidikan, merencanakan pengeluaran, merealisasikan dana dalam penerimaan dan pengeluaran pada pos apa saja keuangan itu ditargetkan untuk mencapai tujuan madrasah dalam meningkatkan mutu madrasah, pengawasan yang

dilakukan sehingga dana yang dikelola baik yang bersumber dari pemerintah, masyarakat dan sumber lainnya. Pelaporan keuangan madrasah dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan madrasah, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan madrasah dan meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah.

Permasalahannya adalah masih banyak dari lembaga pendidikan Islam di antaranya madrasah yang belum secara efektif melaksanakan manajemen keuangan pendidikan sesuai dengan prinsip dan pengelolaan yang telah ditetapkan. Atas dasar itu penulis tertarik untuk menelitinya lebih jauh. Tentang penerapan manajemen keuangan pada lembaga pendidikan Islam, khususnya di Madrasah Tsanawiyah baik negeri maupun swasta. Pemahaman tentang implementasi manajemen keuangan dalam manajemen pendidikan di madrasah mutlak diperlukan, tidak terkecuali pada Madrasah Tsanawiyah. Hal ini dikarenakan setiap madrasah mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dapat digunakan untuk proses peningkatkan mutu madrasah. Konsep ini menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan yang professional berlaku pada Madrasah Tsanawiyah. Peran kepala sekolah dan bendahara menjadi sangat penting bagi proses pengelolaan pendidikan dalam upaya peningkatkan mutu pendidikan khusus pengelolaan keuangan pada Madrasah Tsanawiyah.

Pada studi pendahuluan mengenai dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terdapat beberapa MTs Negeri maupun Swasta yang mampu bersaing dalam manajemen keuangan yang baik. Pengelolaan dana BOS yang diterima banyak sedikitnya jumlah siswa sangat berpengaruh terhadap pengalokasian dana

BOS pada suatu Madrasah, bagi Madrasah yang jumlah siswanya banyak otomatis jumlah dana BOS nya juga lebih besar dibandingkan dengan Madrasah yang jumlah siswanya sedikit. Berikut gambaran penggunaan dana sekolah tahun Pelajaran 2019/2020.

Tabel 1.1 Penggunaan Dana Madrasah

No.	Nama Sekolah	Jumlah Siswa	Penerimaan Dana Bos
1	MTsN 1 Tanah Laut	190	Rp. 190.000.000
2	MTsN 2 Tanah Laut	832	Rp. 832.000.000
3	MTs. Darussalim Bati-Bati	76	Rp. 76.000.000

Sumber: Kemenag Kabupaten Tanah Laut

Sumber keuangan pada ketiga Madrasah tersebut berdasarkan dari banyaknya jumlah siswa yang ada di Madrasah, penerimaan dana BOS untuk satu siswa pada tingkat MTs adalah Rp. 1.000.000,- / persiswa dalam satu tahun anggaran. Sehingga terlihat data pada MTsN 1 Tanah Laut jumlah dana BOS yang tersedia dalam satu tahun yaitu Rp. 190.000.000,-, MTsN 2 Tanah Laut jumlah dana BOS dalam satu tahun yaitu Rp. 832.000.000,- dan MTs Darussalim Bati-Bati dana BOS dalam satu tahun yaitu Rp. 76.000.000,- .

Ketiga Madrasah Tsanawiyah di atas merupakan 3 dari beberapa madrasah yang ada di Kabupaten Tanah Laut baik yang negeri maupun swasta. Ketiga madrasah mampu meraih predikat terbaik dan meraih penghargaan mengenai pengelolaan keuangan yang dimiliki madrasah. manajemen keuangan merupakan dasar bagi ketiga madrasah dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan sekolah. Manajemen yang dilakukan adalah perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Tahapan ini dilaksanakan secara terarah dan sistematis sesuai dengan perdoman RAPBS sehingga ketiga madrasah mampu

meraih prestasi dalam bidang pengelolaan keuangan pada Madrasah Tsanawiyah. Kemampuan madrasah dalam perencanaan, alokasi, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja madrasah (RAPBM) dan pelaporan pertanggungjawaban menjadi sangat penting dan merupakan bagian dari tugas yang dijalankan oleh kepala madrasah dan bendaharawan secara professional.

Berdasarkan hasil audit Inspektorat Jenderal pada Tahun Anggaran 2018 pengelolaan di MTsN 1 Tanah Laut ini termasuk kategori baik dan temuan hasil audit juga sedikit. Kemudian untuk pengelolaan keuangan di MTsN 1 tanah Laut dimana pada penilaian serapan anggaran terbaik oleh KPPN Pelaihari pada tingkat Satker DIPA berskala kecil mendapatkan peringkat ke 2 pengelolaan keuangan terbaik dalam wilayah penilaian KPPN Pelaihari pada tahun 2017 dan tahun 2018.

Observasi awal pada MTsN 2 Tanah Laut selama tiga tahun berturut-turut meraih penghargaan pengelolaan keuangan terbaik dan meraih juara 1 dari KPPN Pelaihari. Penilaian yang dilakukan melalui aspek serapan anggaran tinggi sesuai jadwal, pelaporan yang tepat waktu dan pengelolaan dana DIPA yang terencana. Pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien dalam membiayai kebutuhan sekolah termasuk kegiatan operasional sehingga sekolah mampu mempertahankan sebagai pioneer sekolah negeri yang meraih juara 1. MTsN 2 Tanah Laut mampu bersaing dengan lembaga pendidikan negeri dalam hal mutu pendidikan yang diraih dalam pengelolaan manajemen keuangan. MTsN 2 Tanah Laut merupakan salah satu Madrasah Tsanawiyah yang sangat maju hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah siswa yang ada di MTsN 2 Tanah Laut. Setiap tahunnya MTsN 2 Tanah Laut selalu mendapatkan anggaran belanja Modal untuk Pembangunan

dan sarana prasaran lainnya serta biaya pemeliharaan gedung hal ini dilihat dari DIPA MTsN 2 Tanah Laut setiap tahunnya selalu meningkat. Dengan anggaran yang tersedia di MTsN 2 Tanah Laut banyak kegiatan-kegiatan program pembelajaran yang dilaksanakan yang menjadikan masyarakat berminat menyekolahkan anaknya ke MTs Negeri 2 Tanah Laut.

Pada Madrasah Tsanawiyah swasta yang dijadikan situs penelitian adalah MTs Darussalim Bati – Bati. MTs Darussalim Bati- Bati merupakan salah satu MTs swasta yang lingkungannya ada di Pondok Pesantren Darussalim Bati-Bati dimana disana juga ada untuk jenjang Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Di MTs Darussalim Bati – Bati untuk segala pembiayaannya baik kegiatan operasional atau penggajiannya guru honoraria hanya bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah Pusat yang berasal dari DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut, MTs Darussalim Bati-Bati juga tidak memungut iuran SPP kepada siswanya akan tetapi Madrasah Tsanawiyah Darussalim Bati- Bati tetap menerima sumbangan atau bantuan dari pihak swasta atau orang tua siswa dan dana tersebut dikelola oleh yayasannya. Sebagai madrasah swasta memiliki perbedaan dibandingkan dengan lembaga-lembaga pendidikan lain yang telah lebih mapan, terutama madrasah-madrasah negeri. Tetapi dengan segala keterbatasan yang ada, madrasah-madrasah tersebut masih tetap bisa eksis dan banyak diminati masyarakat.

Data ini menggambarkan tentang profesional madrasah dalam manajemen keuangan yang maksimal dalam program mendukung peningkatan mutu madrasah. Berdasarkan uraian tersebut dalam dasar pemikiran ini, maka peneliti

tertarik untuk meneliti tentang penerapan manajemen keuangan di madrasah yang dituangkan dalam penelitian yang berjudul “Penerapan Manajemen Keuangan pada MTs Negeri dan MTs Swasta di Kabupaten Tanah Laut ”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus dalam penelitian ini meliputi masalah sebagai berikut:

1. Sumber dana keuangan pada MTs Negeri dan MTs Swasta di Kabupaten Tanah Laut?
2. Proses perencanaan anggaran keuangan pada MTs Negeri dan MTs Swasta di Kabupaten Tanah Laut?
3. Penggunaan keuangan pada MTs Negeri dan MTs Swasta di Kabupaten Tanah Laut?
4. Kegiatan pengawasan keuangan pada MTs Negeri dan MTs Swasta di Kabupaten Tanah Laut?
5. Pelaporan pertanggungjawaban keuangan pada MTs Negeri dan MTs Swasta di Kabupaten Tanah Laut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pokok penelitian ini adalah mendeskripsikan secara mendalam dan menganalisis tentang penerapan manajemen keuangan pada MTs Negeri dan MTs Swasta di Kabupaten Tanah Laut. Sedangkan tujuan khusus penelitian ini, yaitu:

1. Mendeskripsikan secara mendalam tentang asal sumber dana keuangan pada MTs Negeri dan MTs Swasta di Kabupaten Tanah Laut.

2. Mendeskripsikan secara mendalam tentang proses perencanaan anggaran keuangan pada MTs Negeri dan MTs Swasta di Kabupaten Tanah Laut.
3. Mendeskripsikan secara mendalam tentang penggunaan keuangan pada MTs Negeri dan MTs Swasta di Kabupaten Tanah Laut.
4. Mendeskripsikan secara mendalam tentang kegiatan pengawasan keuangan pada MTs Negeri dan MTs Swasta di Kabupaten Tanah Laut.
5. Mendeskripsikan secara mendalam tentang bentuk laporan pertanggungjawaban keuangan pada MTs Negeri dan MTs Swasta di Kabupaten Tanah Laut.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan antara lain:

1. Bagi pengambil kebijakan Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dapat digunakan sebagai bahan informasi mengenai keuangan pada madrasah.
2. Bagi pengambil kebijakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut dan Departemen Agama Kabupaten Tanah Laut. hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi tentang penerapan manajemen keuangan khususnya pada Madrasah Tsanawiyah.
3. Bagi kepala sekolah dilokasi penelitian, hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai refleksi penerapan manajemen keuangan yang telah dilakukan untuk dapat dikembangkan kembali yang lebih baik pada masa yang akan datang.
4. Bagi kepala sekolah di luar lokasi penelitian, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebaga referensi untuk menerapkan manajemen keuangan dan

dapat ditemukan sesuatu yang baru ataupun penyempurnaan pengetahuan yang telah ada.

5. Bagi bendaharawan, pendidik dan tenaga kependidikan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengoptimalkan fungsinya masing-masing serta dapat mengatasi atau menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi untuk mempermudah dalam pencapaian tujuan manajemen keuangan yang diharapkan sekolah.
6. Bagi Madrasah lain dapat dijadikan contoh pengelolaan keungan yang baik sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.
7. Bagi peneliti lain yang ingin lebih mendalam tentang penerapan manajemen keuangan, dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai salah satu referensi yang masih bisa dikembangkan melalui penelitian lebih lanjut dengan pendekatan, subyek, lokasi, tema atau variabel yang lain.

E. Definisi Istilah

Untuk membatasi sehingga tidak terjadinya salah penafsiran dalam penelitian ini, maka diberikan definisi istilah sebagai batasan sekaligus penegasan istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini. Penegasan istilah ini dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup permasalahan sesuai dengan tujuan penelitian dalam fokus penelitian ini. Adapun definisi operasional judul sebagai berikut:

1. Manajemen keuangan sekolah merupakan rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari sumber keuangan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan laporan pertanggungjawaban keuangan madrasah. Biaya

pendidikan memiliki cakupan yang luas, adapun ruang lingkup biaya pendidikan dalam penelitian ini membatasi hanya pada biaya operasional penyelenggaraan pendidikan yang diperoleh melalui dokumen Daftar Isian Perencana Anggaran (DIPA) dan BOS pada Madrasah.

2. Madrasah Tsanawiyah merupakan lembaga pendidikan Islam setingkat Sekolah Menengah Pertama yang berada dibawah naungan Kementerian Agama mencakup sekolah negeri dan swasta. Adapun Madrasah Tsanawiyah yang akan dijadikan lokasi penelitian adalah Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Tanah Laut, Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Tanah Laut, dan Madrasah Tsanawiyah Swasta Darussalim Bati-Bati.

Manajemen keuangan sekolah merupakan rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah yang mengatur semua biaya keuangan dari sumber pemerintah (BOS dan DIPA) dan dana dari masyarakat yaitu dari orang tua atau yayasan. Madrasah Tsanawiyah merupakan Lembaga Pendidikan Islam sederajat Sekolah Menengah Pertama yaitu MTs Negeri dan MTs Swasta yang berada di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian Terdahulu penulis menemukan berbagai judul yang menyangkut atau membahas tentang manajemen keuangan, yaitu:

Penelitian Tesis Noor Jennah (2014) Berjudul "*Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong* (Studi Kasus Pada Jenjang Pendidikan Tingkat Menengah). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penganggaran dan pertanggungjawaban pembiayaan

pendidikan pada jenjang pendidikan tingkat menengah Di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganggaran pembiayaan pendidikan dari keempat sekolah yang diteliti dimulai dengan adanya penyusunan rencana kegiatan anggaran sekolah/madrasah (RKAS/RKAM) yang dilakukan setiap tahun.

Penelitian Tesis Ni Luh Kadek Supartini (2012) berjudul “Analisis Satuan Biaya Pendidikan SMAN 1 Sukawati Tahun Pelajaran 2010/2011. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besaran satuan biaya pendidikan dan besaran korelasi antara standar biaya pendidikan dengan peningkatan mutu pembelajaran guru. Hasil penelitian menunjukkan satuan biaya pendidikan SMAN 1 Sukawati Rp. 5.157.347.90000;00 dan satuan biaya pendidikan persiswa Rp. 6.683.151.74 pada tahun pelajaran 2010/2011. Penggunaan dana terbesar untuk biaya operasional personal, kemudian untuk biaya operasional non personal, biaya investasi, beasiswa dan bantuan. Terjadi peningkatan biaya pendidikan SMAN 1 Sukawati dalam pencapaian standar nasional pendidikan. Serta terdapat korelasi yang positif dan signifikan antara kompetensi guru terhadap mutu pembelajaran.

Penelitian Tesis Rachman Firdaus (2004) Manajemen Biaya Pendidikan Dan Mutu Pendidikan Pada Lembaga Pendidikan Swasta (Studi Kasus Di Lembaga Pendidikan Bahasa Asing, LIA, MMC, ELS dan Cinderella di Bandung Tahun 2002/2003). Hasil pertemuan antara lain: Pertama, proses penusunan pembiayaan pendidikan secara umum mempertimbangkan komponen-komponen mandate lembaga, tuntutan stakeholders, dan tuntutan pesaing. Kedua, upaya

strategis dalam menggali sumber-sumber dana dari masyarakat ditempuh melalui dua pendekatan strategis yaitu pendekatan eksternal dan pendekatan internal. Ketiga, proses pengawasan kinerja lembaga dilaksanakan berkaitan dengan akuntabilitas terhadap mutu pendidikan dengan cara evaluasi dan analisis. Keempat, mutu pendidikan menunjukkan keterkaitan yang erat dengan ketersediaan dana.

Dari uraian di atas, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian di atas meneliti tentang penganggaran dan pertanggungjawaban, besaran biaya dan kolerasi serta upaya peningkatan mutu, manajemen biaya sedangkan penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam tentang penerapan pengelolaan manajemen keuangan pada 3 (tiga) MTs Negeri dan MTs Swasta dengan memfokuskan pada sumber dana keuangan, perencanaan anggaran, pengeluaran atau realisasi dana, pengawasan yang dilakukan dalam manajemen keuangan serta bentuk pertanggungjawaban pada Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Tanah Laut.

Ke tiga Madrasah tersebut merupakan Madrasah tingkat Tsanawiyah dimana pengelolaan keuangannya terbaik dan pernah di audit oleh BPK dan Irjen serta mendapatkan penghargaan dari KPPN Pelaihari sebagai pengelolaan laporan keuangan terbaik tingkat anggaran kabupaten Tanah Laut.

G. Sistematika Penulisan

Penulis membagi penelitian ini menjadi beberapa bab yang terangkum dalam sistematika penulisan berikut ini:

Bab I merupakan pendahuluan. Pendahuluan memuat sub bab, yaitu: latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan kerangka teoritis. Membahas tentang beberapa teori yang berkaitan dengan penerapan manajemen keuangan yaitu pengertian, penerapan manajemen keuangan dan sumber keuangan sekolah. Telaah teori ini nantinya akan menjadi pijakan bagi peneliti dalam menelaah mengenai penerapan manajemen keuangan melalui kerangka pemikiran.

Bab III membahas tentang metode penelitian terdiri dari: Pendekatan penelitian, jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan data, tehnik analisis data. Pada bab ini mengurai proses penelitian dimulai dari pendekatan penelitian sampai dengan teknik pengambilan data dan analisis data kemudian dilanjutkan dengan metode pelaporan atau penyajian data.

Bab IV membahas paparan data dan temuan atau hasil penelitian. Pada bagian ini akan diuraikan data yang ditemukan saat proses penelitian untuk memberikan gambaran utuh (objektif) mengenai proses penerapan manajemen keuangan disertai dengan pembahasan.

Bab V Penutup yang merupakan bagian terakhir dalam penelitian ini, karenanya akan diuraikan beberapa poin-poin penting tentang beberapa hal yang ditemukan oleh peneliti sejak awal penelitian ini dirumuskan.